

MENJEJAK KESEHARIAN ETNIS TIONGHOA MADIUN 1966'AN-2000'AN

Hendra Afiyanto¹, Dwi Putri Ayuningtyas²

Jurusan Sejarah Peradaban Islam, IAIN Tulungagung

Penulis Korespondensi: afianto@iainponorogo.ac.id

Abstract: This article was create to reconstruct the identity of appereance Tionghoa ethnic of Madiun after a regime change. The year 1966's was a cultural marker for Thionghoa ethnic unification into Indonesian society. And 2000's was Reformation regime, marker for Tionghoa ethnic freedom on daily life, with KH. Abdurrahman Wahid as a Tionghoa' father symbolism. This article use *ex-post factum* historical method, so historical evidence can be search with interview by historical actors. The author also use Piere Nora conception about experience and memories to see identity used of daily life into two regime. How about economic activities, how about culture coercion, and freedom forms after Orde Baru regime. From here we can see each parts in Tionghoa Ethnic Madiun daily life that distinguishes others. This conclusion of this article is negotiate efforts by ethnic Tionghoa Madiun to defend its existence from regime. This existence it actualized became symbols, such as economic, culture, and social.

Key Words: Tionghoa Community, Madiun, Existence, Regim

Abstrak: Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana konstruksi ulang identitas yang ditampilkan komunitas Tionghoa Madiun setelah pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Rentang waktu yang digunakan adalah 1966'an hingga 2000'an. Tahun 1966'an sebagai penanda secara kultural adanya pemaksaan untuk unifikasi orang-orang Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Sementara tahun 2000'an adalah masa reformasi yang diyakini sebagai penanda kebebasan orang-orang Tionghoa dalam berbagai aktivitas di masyarakat, yang ditandai dengan simbolisasi K.H. Abdurrahman Wahid sebagai bapak Tionghoa. Tulisan ini menggunakan metode sejarah *ex-post factum* sehingga sumber sejarah bisa ditelusuri melalui wawancara dari para pelaku sejarah. Penulis juga menggunakan konsepsi dari Piere Nora terkait pengalaman dan memori mereka untuk melihat identitas yang digunakan dalam keseharian didua masa rezim. Bagaimana aktivitas ekonomi, bagaimana kultur yang harus dipaksa untuk sama dengan kultur masyarakat setempat, dan bentuk kebebasan setelah runtuhnya rezim orde baru. Dari sini nantinya bisa diliat tiap babak keseharian komunitas Tionghoa di Madiun yang membedakan dengan komunitas lainnya di Indonesia. Temuan tulisan ini secara garis besar adalah upaya negosiasi yang dilakukan komunitas Tionghoa Madiun untuk mempertahankan eksistensinya dari rezim. Negosiasi ini teraktualisasi menjadi simbol-simbol, baik secara ekonomi, kultural, dan sosial.

Kata Kunci: Komunitas Tionghoa, Madiun, Eksistensi, Rezim

PENDAHULUAN

Secara historis peran penting etnis Tionghoa di Indonesia dapat dilihat sejak

era nusantara. Andrian Perkasa dalam bukunya menyebutkan bagaimana peranan Cina muslim di Majapahit dan bagaimana

etnis Cina mendominasi dalam sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi kantong strategis bagi masyarakat Tionghoa untuk memperebutkan status sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat di masa Hindia-Belanda bagaimana orang-orang Arab, Cina, Jepang (baca=Timur Asing) mendapat tempat jauh lebih bermartabat dibandingkan pribumi di dalam stratifikasi sosial.

Perjalanan etnis Tionghoa di Nusantara hingga masa republik nyatanya tidak selalu menemui jalan lurus. Geger Pecinan, Kerusuhan 1946, Malari, dan Peristiwa 1998 menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa menjadi suku bangsa yang sering menjadi sasaran kerusuhan masyarakat akibat kekecewaan terhadap diskriminasi pemerintah. Ketidakmampuan etnis Tionghoa untuk melebur ke dalam masyarakat akibat warisan sekat rasial kolonial juga menjadi salah satu penyebab. Akibatnya di masa Orde Baru etnis Tionghoa semakin dibatasi eksistensinya oleh aturan-aturan dari rezim penguasa.

Keterbatasan ruang beraktivitas memaksa etnis Tionghoa untuk mengidentifikasi ulang atas diri mereka. Dananjaya menyebut terkait apa yang dialami oleh etnis Tionghoa sebagai *authohypnotic amnesia*. Hal ini mengakibatkan terjadinya upaya penyangkalan terhadap etnisitas sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensinya. Bagi mereka yang tidak mampu bertahan atas struktur politik dan budaya yang diterapkan rezim maka memilih untuk meninggalkan Indonesia serta memilih Belanda sebagai tempat tinggal baru.

Diskriminasi aturan terhadap etnis Tionghoa di masa Orde Baru nyatanya membuat simbolitas baru di kota Madiun. Madiun dalam konteks administratif dipilih sebagai lokus penelitian, sebab melihat sisi historisnya Madiun merupakan

pusat karesidenan di Jawa Timur bagian barat. Di masa Orde Baru kota Madiun juga menjadi basis komunitas Tionghoa terbesar di bekas karesidenan.

Awal masifnya etnis Tionghoa di Hindia-Belanda sebenarnya diawali dari diaspora. Menurut Wang Gung, proses diaspora etnis Cina ada empat pola, yakni sebagai kuli (*huagong*), pedagang (*huangshang*), Perantauan (*huaqiao*), dan keturunan (*huayi*). Menurut catatan kolonial, jumlah penduduk Timur Asing yang di dalamnya ada etnis Cina hampir sama dengan kota Yogyakarta dan karesidenan Besuki. Umumnya etnis Cina di karesidenan Madiun memilih untuk bertempat tinggal di perkotaan dan mendirikan kantong-kantong komunitas. Sehingga nantinya dapat dilihat bagaimana bentuk negosiasi komunitas etnis Tionghoa Madiun terhadap kebijakan rezim? Bagaimana sarana mereka untuk mengidentifikasi ulang identitasnya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Jejaring Sosio-Ekonomi Dalam Keseharian. Menurut catatan *volkstelling tahun 1920*, etnis Tionghoa merupakan etnis asing terbesar di wilayah Hindia-Belanda. Ada tiga kantong komunitas etnis Tionghoa di Jawa Timur, yaitu: Surabaya, Besuki, dan Madiun. Kota Madiun menjadi kantong utama etnis Tionghoa di Jawa Timur bagian barat. Kondisi ini terkait perjalanan historis kota Madiun yang menjadi karesidenan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dibangunnya Madiun sebagai karesidenan tentunya berimbas pada masifnya perkembangan etnis Tionghoa. Di sinilah proses munculnya pecinan di karesidenan Madiun, yang bertujuan untuk membuka usaha atau berinvestasi, salah satunya adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada orang-orang Tionghoa untuk berdagang. Di samping berdagang,

etnis Tionghoa di karesidenan Madiun juga mengusahakan mata pencaharian bertani, berternak, menjadi buruh pada perusahaan perusahaan yang ada di Madiun.

Konstruksi fisik pecinan di Madiun terlihat dari bangunan Klenteng yang begitu megah. Perkampungan Pecinan Madiun terletak di dekat Pasar Besar Madiun dan Pasar Sleko, tepatnya berada di daerah Jl. Barito (dulunya bernama Gang Tengah), Jl. Agus Salim, Jl. Kutai, sekitar Pasar Sleko. Wilayah tersebut sejak masa kolonial merupakan pusat perekonomian dari komunitas Tionghoa yang tinggal di Madiun. Tidak jauh dari pasar Besar Madiun terdapat bangunan Klenteng Hwie Ing Kong yang difungsikan sebagai tempat peribadatan Tri Dharma yang ada di Madiun.

Sebaran pemukiman etnis Tionghoa juga terdapat di jalan Barito. Etnis Tionghoa yang menempati jalan Barito memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lain di karesidenan Madiun. Umumnya mereka bermata pencaharian sebagai pengusaha roti. Beragam roti menjadi tiang ekonomi di kawasan ini, sehingga secara kehidupan perekonomian mereka lebih baik dari kantong-kantong pecinan di tempat lainnya. Usaha roti etnis Tionghoa di jalan Barito nyatanya masih bertahan samapai sekarang, meskipun ada diantara mereka yang memulai mengembangkan usaha-usaha yang lain seperti menjual bahan kebutuhan pokok. Harmonisasi dalam konteks sosial di karesidenan Madiun berawal dari lingkungan. Kebersihan dan keamanan lingkungan menjadikan beragamnya komposisi masyarakat di Madiun hidup berdampingan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab atas tempat tinggalnya. Hal inilah yang mendasari masyarakat Tionghoa dapat dengan mudah masuk ke dalam sektor ekonomi masyarakat

setempat, karena adanya harmonisasi kehidupan.

Melihat secara umum kehidupan perekonomian etnis Tionghoa di Madiun sangat berbeda dengan di kota lainnya. Umumnya masyarakat Tionghoa Madiun masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bekerja di sektor ekonomi informal, bahkan juga bekerja di perusahaan-perusahaan pribumi dan Tionghoa kaya. Fenomena ini bisa menjadi indikator bahwa umumnya etnis Tionghoa di Madiun masih hidup sebagai kaum miskin perkotaan.

Secara umum masyarakat etnis Tionghoa Madiun dimasukkan ke dalam dua stratifikasi sosial berdasarkan tingkat perekonomiannya, yaitu kelas atas dan bawah. Pembagian stratifikasi sosial berelasi terhadap pola penyebaran pemukiman. Wiliamson mengatakan bahwa konsentrasi penyebaran penduduk terbatas infrastruktur, komunikasi, dan keterbatasan ketersediaan modal. Konsep penyebaran penduduk Wiliamson nyatanya dapat dilihat pada masyarakat Tionghoa di Madiun. Umumnya mereka yang berasal dari kelas sosial atas menempati pusat kota. Mereka bertempat tinggal di wilayah sekitar jalan Kutai karena secara fasilitas perkotaan sangat mencukupi. Orang-orang Tionghoa kelas atas umumnya berprofesi sebagai pengusaha. Beberapa di antara mereka memiliki toko perhiasan.

Berbeda halnya dengan kelompok kelas bawah, umumnya mereka menempati sekitar pinggiran kota. Mereka menggunakan istilah gang tengah untuk menyebut daerah pemukiman kelompok Tionghoa kelas bawah. Secara spesifik aktivitas keseharian mereka ada di gang Puthuk. Sepanjang gang Puthuk dihuni oleh komunitas Tionghoa, yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kelontong, penjual sembako, penjual

barang bekas, dan pembantu rumah tangga. Di rezim Orde Lama perekonomian dijamin secara tertutup, artinya bangsa asing dilarang untuk mencampuri perekonomian masyarakat pribumi. Pemerintah pada masa Orde Lama melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha memproduksi barang, hak usaha grosir dan dalam bidang perdagangan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas perekonomian pribumi.

Kehidupan sehari-hari orang-orang Tionghoa di Madiun dengan masyarakat sekitar berjalan dengan harmonis. Berbeda halnya dengan kehidupan dengan masyarakat di luar Madiun. Masa Orde Baru pernah terjadi gangguan ekonomi pada komunitas Tionghoa Madiun. Saat itu terjadi pembakaran terhadap salah satu toko usaha dagang orang Tionghoa yang berada di Madiun yang terletak di Jl. Trunojoyo. Tindakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga pernah dilakukan tahun 1950.

Saat itu rezim Soekarno pernah menerapkan politik asli yang bertujuan memperkecil kekuatan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini berisi peraturan yang memberikan hak-hak istimewa kepada pengusaha pribumi dan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan nasional yang dimiliki pribumi. Tindakan diskriminasi terutama ditujukan terhadap orang-orang Asing yang tinggal di Indonesia dan khususnya dilakukan pada etnis Tionghoa, tindakan seperti ini sering disebut dengan sistem Benteng. Sistem Benteng ini untuk melindungi persaingan usaha perdagangan antara pengusaha-pengusaha pribumi dengan pengusaha-pengusaha Asing. Kebijakan ini akhirnya berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian etnis Tionghoa di seluruh Indonesia.

Aktivitas sosial etnis Tionghoa di Madiun memiliki keunikan dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tidaklah se-ekstrem seperti yang terjadi di kota-kota lain yang ada di Indonesia misalnya Jakarta, Solo, Semarang. Keberadaan etnis Tionghoa di Madiun tetap tenang dan terjalin hubungan yang damai dan harmonis dengan masyarakat pribumi. Kebiasaan orang-orang Tionghoa yang terdapat di kampung Pecinan tersebut mau membaaur diri dengan masyarakat disekitar nyatanya mampu meminimalkan konflik sosial horizontal. Akibatnya tidak ada konflik yang terjadi antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang pribumi di Madiun. Hal yang sama juga dilakukan pada etnis Tionghoa, apabila mereka sedang mengadakan kegiatan juga mengundang masyarakat pribumi. Adanya toleransi dan harmonisasi sosial masyarakat, berakibat terhadap toleransi dan harmoni ekonomi. Kegiatan perekonomian antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat pribumi berjalan secara sehat.

Perpindahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan pergeseran arah kebijakan pemerintahan, khususnya terkait Tionghoa. Semasa rezim Orde Baru keberadaan etnis Tionghoa ter-stigma kuat di dalam masyarakat. Stigmatisasi yang selalu melekat adalah etnis Tionghoa selalu dianggap pembuat kerusuhan dan pemonopoli perekonomian lokal. Berbagai masalah ditujukan kepada orang-orang Tionghoa sejak zaman kolonial yang oleh penduduk pribumi etnis Tionghoa dianggap sebagai pendukung Belanda dan anti-nasionalisme Indonesia.

Model perekonomian terbuka yang diterapkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru, nyatanya memberikan angin segar bagi perkembangan perekonomian etnis Tionghoa. Melalui sistem ekonomi terbuka maka orientasinya adalah kapitalisme. Kapitalisme membuka jalan

selebar-lebarnya bagi pengusaha Tionghoa untuk memupuk kekayaan. Berbeda halnya dengan komunitas Tionghoa di Madiun. Sistem kapitalisme telah membuat mereka semakin sulit dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari karena umumnya mereka adalah komunitas Tionghoa dengan status sosial bawah.

Kesulitan ini ditambah dengan munculnya beragam aturan pemerintah Orde Baru untuk mengakomodir etnis Tionghoa. Adanya aturan ini secara faktual memberikan perlakuan diskriminasi, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur eksistensi komunitas Tionghoa di Indonesia. Aturan-aturan lain yang diterapkan Orde Baru adalah kebijakan pemerintah, Inpres No.14 tahun 1967. Aturan ini terkait kebijakan asimilasi yang dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan etnis Tionghoa. Tujuan dari aturan ini membuat sekat-sekat sosial yang mempertajam diskriminasi dan perbedaan dengan masyarakat sekitar. Secara umum bertujuan untuk pembatasan segala hal yang berhubungan dengan budaya dan kepercayaan keturunan Tionghoa di muka umum.

Kebijakan pemerintah tersebut dibuat atas pertimbangan bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa di Indonesia dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologi mental dan moral yang kurang wajar bagi warga negara Indonesia. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru menitikberatkan terhadap kebijakan yang bersifat asimilasi. Kebijakan ini mewajibkan etnis Tionghoa untuk melebur di dalam kebudayaan masyarakat setempat, yaitu dimana etnis Tionghoa tersebut tinggal. Etnis Tionghoa di anggap sebagai non-pribumi dan pendatang baru, maka tidak bisa diterima sebagai suku bangsa Indonesia sebelum mereka

terasimilasi. Bagi orang-orang Tionghoa yang terdapat di Madiun juga merasakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Implementasi dari aturan-aturan asimilasi pemerintahan Orde Baru begitu terlihat di dalam komunitas Tionghoa Madiun. Beberapa contoh dapat kita lihat, seperti yang terjadi terhadap penutupan sekolah Tionghoa yang dulu didirikan di jalan Cokrominoto, tepatnya di depan Klenteng Madiun dan juga di jalan Agus Salim yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi perpustakaan Madiun. Aspek kebudayaan Tionghoa yang terdapat di Madiun yaitu segala macam bentuk kebudayaan Tionghoa dan bahasa Tionghoa yang terkena dampak dari pendiskriminasian tersebut. Hal ini di sebabkan adanya kebijakan asimilasi dari pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa termasuk juga seni pertunjukan Barongsai dan Wayang Tiongkok yang merupakan kebudayaan asli dari Tionghoa juga dilarang untuk di pertunjukan di Madiun.

Pergantian rezim di tahun 1998 membawa perubahan yang begitu besar terhadap kehidupan politik Indonesia. Dampak buruk dari pergantian rezim adalah konflik-konflik sosial masyarakat. Etnis Tionghoa merasakan bagaimana mereka secara simbolis ditempatkan dalam ruang obyek kekerasan. Keadaan etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia begitu kritis, seperti: Solo, Jakarta dan lain sebagainya terjadi kekejaman yang terjadi pada etnis Tionghoa. Hal berbeda ketika melihat bagaimana kondisi etnis Tionghoa Madiun saat peristiwa 1998. Kondisi etnis Tionghoa Madiun jauh lebih baik daripada daerah lain di Indonesia. Masyarakat Tionghoa dan pribumi hidup secara aman dan toleran di Madiun.

Ketika daerah-daerah lain di Indonesia mengalami peristiwa kerusuhan, toko-toko dan tempat usaha

orang Tionghoa dibakar. Tempat usaha etnis Tionghoa Madiun tetap menjalankan aktivitas kesehariannya. Hal ini dikarenakan di Madiun tidak mengalami kerusuhan seperti halnya yang terjadi di kota-kota lainnya. Selain itu, kondisi militer di Madiun juga solid, sehingga keadaan di Madiun aman pada saat terjadi kerusuhan peristiwa Mei 1998.

Runtuhnya rezim Orde Baru menjadi penanda terbentuknya struktur baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Simbol-simbol pemerintahan lama mulai dihilangkan dengan maksud untuk memutus mata rantai diktator. Pemerintahan berubah arah menjadi lebih demokratis, khususnya dalam bidang ekonomi. Kuasa penguasa terdesak dengan semangat demokrasi yang berkembang secara masif. Reformasi merupakan sebuah masa di mana terjadi perombakan dalam tubuh pemerintahan yang semula bersifat semi absolut atau militeristik menjadi pemerintahan yang berasaskan demokrasi, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas dan bertanggung jawab. Masa reformasi ini berlangsung sejak tahun 1998 hingga sekarang. Catatan penting di awal rezim Reformasi adalah demokrasi dalam partai politik. Masyarakat disuguhi ragam partai politik salah satunya merupakan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti).

Pertalian dari tumbuhnya pemerintahan Reformasi dan demokrasi dalam politik yaitu ikut memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Madiun. Hal tersebut tampak pada keberadaan etnis Tionghoa di Madiun yang semakin memiliki aksesibilitas yang tinggi apabila dibandingkan dengan masa rezim Orde Baru. Etnis Tionghoa di Madiun dapat leluasa mengembangkan usaha-usaha yang telah dirintis secara turun-menurun. Padahal jika menarik ke belakang terkait bagaimana aturan yang diterapkan oleh

Orde Baru sangat diskriminatif tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa. Pasca-Reformasi, orang-orang Tionghoa lebih berani menampilkan jati diri kebudayaan mereka. Bagi etnis Tionghoa ini merupakan angin segar setelah runtuhnya rezim Soeharto selama tiga dekade.

Tampilnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin pemerintahan di awal reformasi merupakan angin segar bagi orang-orang Tionghoa. Gus Dur menjadi sosok sentral pada masanya yang menghapus larangan hak-hak etnis Tionghoa untuk kembali memperkenalkan adat dan kebudayaan asli negara Tionghoa. Muaranya adalah bagaimana kehidupan secara mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia serupa dengan etnis Tionghoa Madiun yang secara bebas dapat tampil dan menyalurkan aspirasinya.

Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur beberap kali melakukan langkah progresif terkait aturan untuk etnis Tionghoa. Salah satu langkah populernya yang sampai saat ini menjadi warisan ingatan adalah mengakui Kong Hu Chu sebagai salah satu agama di Indonesia. Dengan diberikannya kesempatan untuk mengekspresikan identitas kebudayaan mereka, secara tidak langsung pemerintah sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang-orang Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Tokoh Gus Dur sangat populer di kalangan masyarakat Tionghoa, karena semenjak menjadi Presiden, beliau menghapus Inpres No. 14 tahun 1967 dan digantikan dengan Kapres No. 6 tahun 2000.

Pemerintah Gus Dur sudah membuka jalan bagi orang-orang Tionghoa untuk menunjukkan identitas kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Melalui kebudayaan asli dari Tionghoa, seperti Barongsai dan wayang Tionghok mulai

diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Di Madiun dalam pertunjukkan kesenian Barongsai mendapatkan tempat sendiri dalam masyarakat. Masyarakat memiliki antusias yang tinggi pada waktu kesenian ini sehingga sampai sekarang kesenian Barongsai yang ada di Madiun tetap dilestarikan. Pada acara-acara tertentu di Madiun seringkali menampilkan kesenian Barongsai dengan melibatkan orang-orang Jawa pada saat pertunjukkan.

Kesenian Barongsai semenjak pemerintahan Gus Dur sampai sekarang ini mengalami banyak perkembangan. Saat ini kesenian Barongsai juga dapat dipelajari oleh masyarakat pribumi, tidak hanya orang-orang Tionghoa saja yang mempelajarinya. Di Madiun untuk mempelajari kesenian Barongsai bisa dilakukan di Klenteng Hwie Ing Kong yang berada di jalan Cokroaminoto, bahkan dalam perkembangannya di Madiun kesenian Barongsai juga sudah masuk di kalangan Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Taman Kelurahan Demangan yang bernama Pondok Pesantren Mujaddadiyah, cabang dari Pondok Pesantren ini juga terletak di Kecamatan Kare. Selain kesenian Barongsai kebudayaan Tionghoa yang masuk di Indonesia, yaitu wayang Tiongkok dalam ulang tahun Klenteng ditayangkan selama satu bulan penuh, makanan khas orang Tionghoa yang disajikan pada saat ulang tahun Klenteng Madiun misalnya Ca Kwe, Kue Goreng, Bakpao yang disajikan untuk kalangan masyarakat umum Madiun secara gratis.

Megawati Soekarno Putri sebagai pengganti Gus Dur juga dinilai banyak membuat aturan perubahan bagi etnis Tionghoa. Pada masa pemerintahan Megawati mulai menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional di Indonesia. Imlek merupakan tahun baru bagi kebudayaan Tionghoa, dimana dalam perayaannya dirayakan sangat meriah.

Khususnya di Madiun sendiri dalam perayaan malam Tahun baru Implek dirayakan di Klenteng atau tempat peribadatan Tri Dharma (TITD). Selanjutnya, pada malam perayaan terdapat lampion-lampion untuk menghiasi suasana saat malam sebagai adat atau ciri khas dari budaya Tionghoa. Sehingga menjadi suguhan yang menghibur masyarakat Madiun, juga pada sore hari sebelum acara tahun baru sering menampilkan pertunjukkan kesenian Barongsai.

Pada masa reformasi tahun 1999 mulai ada keterbukaan pemerintah terhadap keberadaan klenteng dan komunitasnya. Kemudian pada tahun 2000 di keluarkannya Kapres No. 6 tahun 2000 yang berisi tentang pencabutan Inpres No.14 tahun 1967 dan diakuinya agama Kong Hu Cu sebagai agama resmi di Indonesia. Di era-Reformasi memberikan pengaruh di sektor perekonomian Madiun. Umumnya dari orang-orang keturunan Tionghoa mulai mengembangkan beberapa usahanya yang sudah berjalan di Madiun. Beberapa keturunan etnis Tionghoa yang berhasil dalam meningkatkan usaha-usahanya di Madiun. Hal ini dapat dibuktikan di daerah kawasan Pecinan yang ada di Madiun berfungsi sebagai tempat untuk berdagang dan mendirikan usaha-usaha. Sebagian besar perekonomian di Madiun sekarang ini didominasi oleh keturunan orang-orang Tionghoa di bidang usaha atau perdagangan. Beberapa orang-orang keturunan Tionghoa mendirikan berbagai usaha-usaha di Madiun misalnya, daeler motor dan bengkel, toko bangunan, apotek, toko emas, kain, dan elektronik.

Pada masa era reformasi dimulai tahun 1999 mulai ada keterbukaan pemerintah terhadap keberadaan klenteng dan komunitasnya. Kemudian pada tahun 2000 di keluarkannya Kapres No. 6 tahun 2000 yang berisi tentang pencabutan

Inpres No.14 tahun 1967 dan diakuinya agama Kong Hu Cu sebagai agama resmi di Indonesia. Di era-Reformasi memberikan pengaruh di sektor perekonomian Madiun. Banyak dari orang-orang keturunan Tionghoa mulai mengembangkan beberapa usahanya yang sudah berjalan di Madiun. Banyak keturunan etnis Tionghoa yang berhasil dalam meningkatkan usaha-usahanya di Madiun. Hal ini dapat dibuktikan di daerah kawasan Pecinan yang ada di Madiun berfungsi sebagai tempat untuk berdagang dan mendirikan usaha-usaha. Sebagian besar perekonomian di Madiun sekarang ini didominasi oleh keturunan orang-orang Tionghoa di bidang usaha atau perdagangan. Beberapa orang-orang keturunan Tionghoa mendirikan berbagai usaha-usaha di Madiun misalnya, diller motor dan bengkel, toko bangunan, apotek, toko emas, kain, dan elektronik.

Sekat-sekat fisik dan sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis yang lainnya juga sudah mulai terbuka. Aktualisasi dari terbukanya sekat tersebut antara lain perkembangan kehidupan kampung Pecinan adalah sudah banyak bercampur dengan masyarakat dari berbagai macam etnis seperti Arab, Madura, Jawa, bahkan mereka juga melakukan perkawinan dengan orang-orang pribumi. Kebebasan aktivitas pada masyarakat Tionghoa di masa Reformasi mendorong komunitas Tionghoa Madiun untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi. Di kampung Pecinan ini banyak orang-orang Tionghoa yang mulai mengembangkan usahanya di luar kampung Pecinan dan ada sebagian masyarakatnya yang pindah ke daerah lain atau luar kota untuk mencoba merintis usahanya. Hasilnya kampung Pecinan Madiun pada masa Reformasi tidak hanya terpusat di daerah jalan Barito, jalan Kutai, jalan Cokroaminoto, jalan Agus Salim, dan jalan Trunojoyo, namun

sekarang ini sudah menyebar di seluruh kawasan di daerah Madiun.

Pasca reformasi pusat ekonomi pecinan Madiun ada di jalan Kutai dan umumnya adalah pengusaha perhiasan emas. Pecinan di jalan Kutai saat ini tidak sepenuhnya ditempati oleh etnis Tionghoa Madiun. Masyarakat di daerah pecinan Madiun sudah lebih heterogen. Etnis Tionghoa dari daerah lain juga mulai bertempat tinggal di pecinan Madiun. Perbedaannya adalah etnis Tionghoa asli Madiun merupakan kelas masyarakat dengan status sosial bawah sedangkan etnis Tionghoa dari luar Madiun adalah mereka dengan status sosial atas.

PENUTUP

Pergantian rezim selalu memunculkan narasi terkait menang-kalah, kuat-lemah, dll. Etnis Tionghoa yang *notabene* minoritas dalam negara Indonesia, selalu ditempatkan dalam ruang inferioritas. Pada masa Hindia-Belanda etnis Tionghoa setidaknya pernah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah kolonial. Etnis Tionghoa yang dimasukkan dalam masyarakat Timur Asing menjadi kelas dua dalam stratifikasi sosial kolonial. Implikasinya mereka lebih mendapatkan kebebasan daripada pribumi pada masa kolonial.

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 nyatanya menjadi awal perubahan besar dalam keseharian etnis Tionghoa. Di masa Soekarno mereka masih mendapat kebebasan aspirasi dari rezim. Hal berbeda ketika rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. Berbagai macam undang-undang yang terkait etnis Tionghoa menjadi sebuah simbol terbatasnya aktivitas mereka. Etnis Tionghoa di beberapa wilayah Indonesia memiliki nasib yang sama, tetapi tidak bagi etnis

Tionghoa Madiun. Mereka membuat negosiasi-negosiasi sehingga mampu menunjukkan fenomena yang berbeda dibandingkan di daerah lainnya.

Keunikan dari etnis Tionghoa Madiun adalah mereka tidak merasa tertekan oleh aturan Orde Baru terkait kehidupan ekonomi. Umumnya masyarakat Tionghoa Madiun berstatus sosial bawah, sehingga kesulitan ekonomi yang dirasakan pengusaha-pengusaha tidak mempengaruhi aktivitas mereka. Secara sosial mereka juga lebih mudah bergaul dengan pribumi Madiun. Kelas sosial bawah mampu menempatkannya pada posisi lebih mudah untuk membaur di dalam masyarakat. Terkikisnya sekat-sekat sosial anantara etnis Tionghoa dengan pribumi merupakan simbolisasi dan upaya mereka menembus labelisasi Tionghoa. Ketika sekat ini terkikis maka secara sosial-ekonomi aturan-aturan rezim Orde Baru yang memojokkan etnis Tionghoa bisa diminimalkan.

Keberhasilan negosiasi ini terlihat ketika terjadi peristiwa Mei 1998. Pecahnya kerusuhan menjadi penanda nyata teror-teror terhadap etnis Tionghoa. Di saat beberapa etnis Tionghoa di Indonesia dalam posisi tidak aman dikehidupannya, maka hal sebaliknya terjadi di Madiun. Stabilitasnya aktivitas sosial dan ekonomi etnis Tionghoa Madiun menjadi simbol suksesnya negosiasi terhadap aturan dari rezim Orde Baru. Fenomena ini juga memunculkan persepsi baru bahwa aturan rezim Orde Baru nyatanya tidak sepenuhnya berhasil mengalienasi kehidupan etnis Tionghoa. Keberhasilan membangun jejaring dengan masyarakat pribumi dalam berbagai bidang seolah meruntuhkan teori akan keberhasilan Orde Baru menekan kehidupan minoritas Tionghoa. Muaranya adalah ketika reformasi menjadi babak baru dalam kehidupan etnis Tionghoa khususnya Madiun, kebudayaan mereka

mampu terdiseminasi sampai pada pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Volkstelling 1920, Deel II

Buku

- Afthonul, Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia Pergulatan Mencari Jati Diri*, Depok: Kepik, 2012.
- Asgart, Munawar Sofwan, *Komunitas Cina Benteng (Cibet) di Tangerang: Potet Pembauran di Tingkat Lokal*, Jakarta: Kemenristek Dikti, 2005.
- F., Bloomfield. 1983, *Chinese Beliefs*. Surabaya : Penerbit Liris.
- J., Babari dan Albertus Sugeng, *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Fatma Press 1999.
- Justian, Suhandinata, WNI *Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Kusumaningtyas, Purwanti, *Perlakuan Diskriminatif terhadap Etnis Tionghoa di Amerika dan di Indonesia*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pasca Kolonial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Perkasa, Adrian, *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, Yogyakarta: Ombak, 2012

Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta; Pustaka LP3ES, 1999.

Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti, 1968.

Nurcahyono, Daud Ade, *Kebijakan Ordr Baru terhadap Etnis Tionghoa*, Universitas Sanata Darma Yogyakarta.

Nuryani, Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, Yogyakarta: Garasi, 2002.

Rustopo, *Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Wibowo dan Ju Lan Thung, *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Wang Gu Wu, *Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice*. Dalam Gary Hamilton (ed), *Cosmopolitan Capitalists: Hongkong and the Chinese diaspora at the end of twentieth Century*, Washington DC: University of Washington DC, 1999.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Sumiati, Pedagang Roti, 14 Mei 2018.

Wawancara dengan ibu Pramono, pedagang toko plastik, 3 juni 2018.

Wawancara dengan bapak Bambang, seorang satpam di Klenteng Hwie Ing Kiong, 26 Mei 2018.

Wawancara dengan Rudy Suwanto, 29 mei 2018.

Wawancara dengan Sodiq Purnomo, 14 mei 27 2014.

Wawancara dengan bapak Suherman (Suee Liem), Pejaga kelontong di jln Sleko 07 Madiun, 29 Mei 2018.

Jurnal

Arie Setyaningrum, "Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-Kolonial: Dinamika Strategi Ekonomi dan Identitas Budaya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, 2004

Ali Mustajab: Kebijakan Politik, *KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA*, Gus Dur Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 5, No. 1, November 2015.

J.G, Wiliamson, "Regional Inequality And The Process of National Development: A Description of The Patterns". *Economics Development and Cultural Change Journal USA*: University of Chicago Press, 1965.

Jurnal Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN, *Sejarah Dan Perkembangan Kampung Pecinan Di Kota Madiun Masa Orde Lama Hingga Reformasi (Studi Sosial-Ekonomi)*.

Jurnal PUBLIKA BUDAYA Fakultas Sastra Universitas Jember, *Indonesian Government Policy Influence on the Lives of Ethnic Chinese in the Political, Social Cultural, and Economic in the Jember district the Old Order up to the Reform period 1998-2012*, Volume 2, Juli 2014.

Purwanti Kusumaningtyas, *Perlakuan Diskriminatif terhadap Etnis Tionghoa di Amerika dan di Indonesia*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Ririn Darini, *Kebijakan Negara Dan Sentimen Anti Cina Prespektif Historis*, Jurnal.

Rizki Aryono Putro, "Sejarah Dan Perkembangan Kampung Pecinan Di

Kota Madiun Masa Orde Lama
Hingga Reformasi (Studi Sosial-
Ekonomi)”, *Jurnal Agastya*,
(Madiun: UNIPMA, 20013), Vol.
02, No. 02

Turhomo Raharjo, *Kebijakan Pemerintah
Tentang Etnis Cina dalam Dialogue
JIAKP*, vol.2, No.2. Mei 205.